

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR
GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA GAMPONG
(STUDI PADA KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**DESI MONICA
NPM : 1902110088**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA

TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092

BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 05 Februari 2025

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DESI MONICA
NPM : 1902110088

Dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR GAMPONG
DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG TERHADAP
KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG (STUDI PADA
KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 17 Januari 2025

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Syamsidar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota

Fitri Yuni, S.E., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Anggota

Hendry Mauliansyah, S.E.,
NIK. 19881082 202212 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 05 Februari 2025

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

DESI MONICA
NPM : 1902110088

Dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR GAMPONG
DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG TERHADAP
KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG (STUDI PADA
KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si., Ak
NIK. 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 19700408 199401 1 001

Pembimbing II

Fitri Yunida, S.E., M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 05 Februari 2025
Yang Menyatakan



Desi monica
Desi monica

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Desi monica
NPM : 1902110088
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG (STUDI PADA KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Februari 2025

Yang Menyatakan,


Desi monica

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi Pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Dr. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan sekaligus Selaku

pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Budi Safatul Anam, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Fitri Yunina, SE, M.Si selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1. Landasan Teoritis	9
2.1.1 Kinerja Pengelolaan Dana Desa.....	9
2.1.1.1 Pengertian Kinerja.....	9
2.1.1.2 Pengertian Kinerja Pengelolaan Dana Desa.....	10
2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Desa.....	11
2.1.1.4 Indikator Kinerja Pengelolaan Dana Desa	12
2.1.2 Partisipasi Masyarakat	13
2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	13
2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	15
2.1.2.3 Indikator Partisipasi Masyarakat.....	15
2.1.3 Kapasitas Aparatur Gampong	16
2.1.3.1 Pengertian Kapasitas Aparatur Gampong	16
2.1.3.2 Indikator Kapasitas Aparatur Gampong.....	18
2.1.4 Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong	18
2.1.4.1 Pengertian Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong.....	18
2.1.4.2 Tahapan dan Jenis Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong.....	24
2.1.4.3 Indikator Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong	25
2.2. Penelitian Sebelumnya	26
2.3. Kerangka Penelitian	31
2.4. Hipotesis	34
 BAB III METODE PENELITIAN	 36
3.1. Desain Penelitian.....	36
3.1.1. Tujuan Penelitian	36

3.1.2. Jenis Penelitian.....	36
3.1.3. Horison Waktu	37
3.1.4. Unit Analisis	37
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	38
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.4. Definisi Operasionalisasi Variabel.....	40
3.5. Teknik Analisis Data.....	42
3.6. Pengujian Data	42
3.6.1 Pengujian Validitas	44
3.6.2 Pengujian Reliabilitas.....	44
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	44
3.7. Pengujian Hipotesis.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.2. Karakteristik Responden	50
4.1.3. Deskriptif Variabel Penelitian.....	52
4.1.3.1. Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	52
4.1.3.1. Variabel Partisipasi Masyarakat.....	53
4.1.3.1. Variabel Kapasitas Aparatur Gampong	54
4.1.3.1. Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong	56
4.1.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	57
4.1.4.1. Hasil Uji Validitas.....	57
4.1.4.2. Hasil Uji Reliabilitas.....	58
4.1.4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	59
4.1.5. Hasil Pengujian Hipotesis	62
4.1.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda	62
4.1.5.2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2).....	64
4.1.5.3. Hasil Pengujian Hipotesis	66
4.1.5.3.1. Pengujian Secara Bersama-Sama.....	66
4.1.5.3.2. Pengujian Secara Parsial	66
4.2. Pembahasan.....	67
4.2.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	67
4.2.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	68
4.2.3. Pengaruh Kapasitas Aparatur Gampong Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	69
4.2.4. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.....	70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1 Horison Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Nama Gampong Di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.....	38
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 3.4 Skala Likert	42
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	50
Tabel 4.2 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	52
Tabel 4.3 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat.....	53
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kapasitas Aparatur Gampong	55
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	58
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.9 Pengaruh variabel bebas terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong	63
Tabel 4.10 Model Summury	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas	60
Gambar 4.2. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	62

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KAPASITAS APARATUR
GAMPONG DAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN
GAMPONG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA GAMPONG
(STUDI PADA KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE)**

**DESI MONICA
NPM : 1902110088**

Pembimbing I : Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
Pembimbing II : Fitri Yunina, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie). Data penelitian dikumpulkan melalui daftar pertanyaan/kuisisioner dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji simultan dan uji parsial dimaksud untuk mengetahui secara bersama-sama dan secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Objek dalam penelitian ini pada Kecamatan Sukamakmur Aceh Besar. Ukuran sampel penelitian ini sebanyak 84 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

Kata kunci: *Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong, Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong*

*THE EFFECT OF COMMUNITY PARTICIPATION, VILLAGE APPARATUS
CAPACITY AND VILLAGE DELIBERATIVE BODY SUPERVISION ON VILLAGE
FUND ALLOCATION MANAGEMENT PERFORMANCE
(STUDY IN BATEE DISTRICT, PIDIE REGENCY)*

DESI MONICA
NPM : 1902110088

Supervisor I : Dr. H. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
Supervisor II : Fitri Yunina, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence of Community Participation, Village Apparatus Capacity and Village Consultative Body Supervision on Village Fund Allocation Management Performance (Study in Batee District, Pidie Regency). Research data were collected through a questionnaire and documentation study. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis, simultaneous tests and partial tests were intended to determine simultaneously and partially the influence of independent variables on the dependent variable at a 95% confidence level ($\alpha = 0.05$). The object of this study was Sukamakmur District, Aceh Besar. The sample size of this study was 84 respondents. The results of the study indicate that Community Participation, Village Apparatus Capacity and Village Consultative Body Supervision both simultaneously and partially influence the Performance of Village Fund Allocation Management (Study in Batee District, Pidie Regency).

Keywords: Community Participation, Village Apparatus Capacity, Village Consultative Body Supervision and Village Fund Allocation Management Performance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dana Desa merupakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk desa-desa di Indonesia. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian disalurkan ke desa-desa melalui pemerintah daerah. Penggunaan Dana Desa diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, serta harus mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Salah satunya yaitu undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aulia, 2020).

Kinerja pengelolaan alokasi dana desa merupakan evaluasi atas bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan dana desa mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penggunaannya. Evaluasi kinerja pengelolaan alokasi dana desa penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk mendorong pertanggungjawaban dan peningkatan kualitas pengelolaan ke depan.

Pengelolaan dana desa dengan baik serta merata dan mencakup keseluruhan daerah dapat mengembangkan atau memajukan pembangunan daerah tanpa terjadi ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk meningkatkan pembangunan desa manajemen pengelolaan harus direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik pula, selain itu dalam pelaksanaan alokasi dana harus merata (Nuryadi, et al., 2023)

Dampak kinerja pengelolaan alokasi dana desa dapat sangat signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Penggunaan dana desa yang efektif dapat menghasilkan peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas publik lainnya. Ini akan membantu memperbaiki aksesibilitas dan mobilitas masyarakat di desa serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dana desa yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat desa serta mengurangi disparitas dalam akses layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan alokasi dana desa diantara partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur dan pengawasan badan permusyawaratan gampong (Suryani & Hidayat, 2023). Partisipasi masyarakat merupakan proses di mana individu-individu dalam suatu komunitas atau masyarakat terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, proses pengambilan keputusan, dan program-program yang berdampak pada kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai tingkatan partisipasi, mulai dari partisipasi dalam pembuatan keputusan hingga pelaksanaan

program-program pembangunan. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, baik itu dalam tingkat desa, kabupaten, maupun nasional. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum partisipatif seperti musyawarah desa, forum diskusi, atau mekanisme konsultasi publik (Firdaus, 2019).

Masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan, aspirasi, dan preferensi mereka. Hal ini dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program-program pembangunan serta memastikan bahwa mereka benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat juga penting dalam proses pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan. Melalui partisipasi aktif dalam pemantauan, masyarakat dapat membantu mengidentifikasi masalah, memberikan umpan balik, dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya.

Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa berikutnya adalah kapasitas aparatur desa. Kapasitas aparat desa atau gampong merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pejabat dan staf pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan tentang regulasi dan prosedur hingga keterampilan manajerial dan interpersonal. Aparatur gampong perlu memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola proyek-proyek pembangunan di tingkat desa, termasuk identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, pemilihan kontraktor, dan pemantauan pelaksanaan proyek. Meningkatkan kapasitas aparat

gampong adalah suatu investasi yang penting dalam memperkuat pemerintahan lokal dan memastikan pengelolaan yang efektif dan inklusif di tingkat desa. Ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Suryani & Hidayat, 2023).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (BPG). Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong merupakan salah satu mekanisme kontrol yang penting dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan di tingkat desa atau gampong. BPG memiliki peran yang signifikan dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dari kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa (Ningsih, 2020). BPG memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana desa. Ini termasuk pemeriksaan terhadap laporan keuangan, audit internal, serta pengawasan terhadap praktik keuangan yang berpotensi merugikan keuangan desa. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Gampong merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Permasalahan yang terjadi berdasarkan dikutip dari beberapa informasi di media internet bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie menetapkan salah satu Keuchik di salah satu Gampong yang ada di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie sebagai tersangka, hal ini dikarenakan keuchik tersebut telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan APBG tahun anggaran 2018-2020. Perhitungan kerugian keuangan negaran ditemukan sebesar Rp 393.139.845,91. Modus yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa seperti mengelola dana pribadi dan setiap

penarikan dana APBG 2018-2019 tidak melalui mekanisme yang berlaku. Setiap melakukan pencairan APBG Keuchik selalu mengabaikan kelengkapan administrasi atau syarat pencairan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik terdapat kegiatan yang dikerjakan volumenya tidak sesuai dengan dokumen dan pihak petugas pemeriksaan juga menemukan kelebihan bayar pada kegiatan pembangunan fisik. Kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh keuchik yaitu mengambil dana untuk kegiatan pembentukan BUMG Gampong tersebut sebesar Rp 150.000.000 bahwa pihak BUMG tidak pernah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Keuchik sampai akhir masa tahun anggaran 2019 (<https://www.acehonline.co>).

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)?.

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)?.
3. Apakah kapasitas aparatur gampong berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)?.
4. Apakah pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)
2. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)
3. Untuk menguji pengaruh kapasitas aparatur gampong secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)

4. Untuk menguji pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambahkan wawasan penulis dalam bidang akuntansi terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong
 - b. Sebagai referensi bagi penelitian sejenis yang akan di masa yang akan datang yaitu mengenai partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi Aceh khususnya di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

serta kinerja pengelolaan alokasi dana gampong yang diteliti pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

2.1.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Moeheriono, 2020:23). tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa proyek dan program yang didanai sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Se jauh mana alokasi dana desa berhasil mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Ini termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup penduduk desa.

Kinerja adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dengan tugas-tugas yang realitis dan gambaran perilaku difokuskan kepada konteks pekerjaan, yaitu perilaku diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja menentukan kinerja yang memenuhi kebutuhan organisasi (Harris, 2020:23). Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa

yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakan sesuatu. Kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah. (Mangkunegara, 2020:16). Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Jumali, 2021:86)

Berdasarkan beberapa kajian teoritis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam organisasi.

2.1.1.2 Pengertian Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja pengelolaan alokasi dana desa merujuk pada seberapa efektif dan efisien penggunaan dana desa oleh pemerintah desa atau pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut. Kinerja pengelolaan alokasi dana desa mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana desa untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa (Perdana, 2019:5). Kinerja pengelolaan adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi bergantung kepada bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat memonitoring dan membantu proses kinerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada lembaga tersebut (Suryawan, 2020:6).

Kinerja pengelolaan dana gampong atau dana desa biasanya diukur berdasarkan efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat setempat. Seberapa transparan dan akuntabelnya pengelolaan dana gampong dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaannya. Tingkat transparansi dan akuntabilitas dapat dinilai dari seberapa mudahnya masyarakat untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana dan keputusan yang dibuat oleh pengelola (Aulia, 2020:4).

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja mengacu pada prestasi kerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Kinerja individu pegawai yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

2.1.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan alokasi dana desa adalah (Ningsih, 2020:4):

1. Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di tingkat komunitas atau masyarakat. Partisipasi ini dapat berbentuk kontribusi ide, tenaga, waktu, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama.
2. Kapasitas aparatur gampong
Kapasitas aparatur gampong mengacu pada kemampuan dan kompetensi aparatur desa atau gampong dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengelola pemerintahan desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pembangunan di tingkat desa secara efektif dan efisien.
3. Pengawasan badan permusyawaratan gampong
Pengawasan badan permusyawaratan gampong adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau lembaga sejenis di tingkat desa terhadap kinerja pemerintah desa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan

pemerintah desa dijalankan sesuai dengan aturan, transparan, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa.

2.1.1.4 Indikator Kinerja Pengelolaan Dana Desa

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Indikator untuk mengukur Kinerja individu pegawai menurut Jumali (2021:86) adalah sebagai berikut;

1. **Pemanfaatan Sistem Komputer:**
Pemanfaatan sistem komputer merujuk pada penggunaan teknologi komputer dalam berbagai bidang untuk mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan output yang lebih baik. Sistem komputer digunakan untuk mengolah data, menyimpan informasi, serta menjalankan aplikasi-aplikasi yang mendukung berbagai aktivitas manusia, mulai dari pekerjaan administratif, pendidikan, penelitian, hingga hiburan.
2. **Layanan Komputer:**
Layanan komputer adalah layanan yang disediakan oleh perangkat komputer, baik secara langsung maupun melalui jaringan, untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Layanan ini bisa mencakup penyediaan akses internet, pengolahan data, penyimpanan data, dan penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung berbagai kegiatan. Layanan komputer juga mencakup layanan purna jual, pemeliharaan, dan dukungan teknis yang terkait dengan perangkat keras atau perangkat lunak.
3. **Produktif dan Kreatif:**
Produktif dan kreatif merujuk pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan karya atau hasil yang memiliki nilai tambah dalam waktu yang efektif. Produktivitas mengacu pada seberapa banyak hasil yang dapat dicapai, sedangkan kreativitas berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir out of the box dan menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Dengan menggabungkan keduanya, seseorang atau organisasi dapat menciptakan solusi yang efisien dan inovatif dalam mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan.
4. **Efektivitas dan Produktivitas:**
Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan produktivitas mengacu pada rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Efektivitas lebih fokus pada kualitas dan pencapaian tujuan, sementara produktivitas lebih terkait dengan kuantitas hasil yang dicapai dalam waktu yang ditentukan. Untuk mencapai hasil yang optimal, keduanya harus berjalan seiring, yaitu dengan memastikan bahwa tujuan tercapai secara efektif sambil menjaga tingkat produktivitas.

5. **Sarat Layanan:**

Sarat layanan merujuk pada kondisi atau ketentuan yang harus dipenuhi agar layanan komputer atau teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Ini mencakup ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai, infrastruktur jaringan yang stabil, serta keterampilan atau keahlian pengguna untuk memanfaatkan layanan tersebut. Sarat layanan juga mencakup jaminan pemeliharaan dan dukungan teknis agar layanan tetap berfungsi dengan optimal.

6. **Lebih Produktif:**

Lebih produktif berarti menghasilkan lebih banyak hasil atau output dalam waktu yang lebih singkat dan dengan lebih sedikit sumber daya, atau mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan alat dan teknologi yang tepat, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, serta mengelola waktu dan sumber daya secara lebih baik. Dalam konteks komputer, menjadi lebih produktif bisa berarti memanfaatkan software atau aplikasi yang mendukung pekerjaan secara optimal, serta mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas yang berulang.

2.1.2 Partisipasi Masyarakat

2.1.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Menurut Handayani (2021:40) Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Supomo dan Indriantoro (2021:17) menyatakan partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Partisipasi secara luas pada dasarnya merupakan proses organisasional, dimana para individual terlibat dan mempunyai pengaruh dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan konstribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Yuwono (2021:124) memberikan beberapa rincian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama.
2. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.
3. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
4. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

2.1.2.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Marschall (2018:37) dapat dilihat berdasarkan indikator, yaitu:

1. Adanya kontribusi
Adanya kontribusi merujuk pada partisipasi dan sumbangan yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam bentuk ide, tenaga, waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk mendukung suatu kegiatan, proyek, atau tujuan bersama.

2. Adanya pengorganisasian

Adanya pengorganisasian mengacu pada proses pengaturan dan penyusunan berbagai elemen dalam suatu sistem atau kegiatan agar berjalan teratur dan efektif. Pengorganisasian mencakup perencanaan, pembagian tugas, koordinasi, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Peran masyarakat dan aksi masyarakat

Peran masyarakat merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan bersama. Aksi masyarakat adalah tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti kegiatan gotong royong, kampanye lingkungan, atau program kesehatan.

4. Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat

Motivasi masyarakat adalah dorongan atau alasan yang membuat individu atau kelompok dalam masyarakat ingin terlibat dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan atau program.

2.1.3 Kapasitas Aparatur Gampong

2.1.3.1 Pengertian Kapasitas Aparatur Gampong

Kapasitas aparatur gampong merujuk pada kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh staf atau pejabat pemerintah di tingkat gampong atau desa. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, memimpin pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.

Kapasitas aparatur gampong merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan meningkatkan kapasitas aparatur gampong, diharapkan pelayanan publik dapat ditingkatkan, pembangunan dapat dijalankan secara efisien, dan kehidupan masyarakat desa dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat gampong atau desa.

Kapasistas aparatur penting dalam usaha organisasi mencapai keberhasilan yang dapat menunjang organisasi melalui karya, bakat, kreatifitas dan dorongan. Menurut Soeprapto (2021:10) mengatakan bahwa kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, dalam rumusan lain *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Soeprapto (2021:12) menyatakan bahwa kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan proses dan aturan-aturan baku tertentu. Soeprapto (2021:9) mendefinisikan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individ, suatu organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan.

2.1.3.2 Indikator Kapasitas Aparatur Gampong

Indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas aparatur, yaitu sebagai berikut (Wibowo, 2020:87):

1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motiv mendorong, mengarahkan dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Seperti halnya kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri kompetensi seorang pilot tempur.
3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

2.1.4 Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

2.1.4.1 Pengertian Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan berasal dari akar kata “was”, mendapat awal”an” dan akhiran “an” artinya penilikan dan penjagaan. Namun untuk penjelasan berikut pengawasan

dikaitkan dengan fungsi manajemen pemerintah daerah. Pengawasan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan budaya organisasi yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKDesa) tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakn melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan pertanggung jawabannya, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Syafii (2018:109) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart (ukuran). Sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, agar dapat diselesaikan

secara sempurna sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Menurut Murhaini (2018:3) pengawasan adalah tindakan aparat pemerintah agar pelaksanaan kegiatan dan tugas yang ditetapkan dapat tercapai serta menghindari dari terjadinya penyimpangan. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dikerjakan, dilaksanakan, atau diselenggarakan kemudian menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen, dimana fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan proses manajemen. Dengan tindakan pengawasan akan dapat diketahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan para pegawai sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan apabila ternyata ada

penyimpangan dari rencana, kebijaksanaan maupun pemerintah yang telah dikeluarkan, dapat segera diketahui dan selanjutnya diadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengaturan lebih rinci atas pembinaan dan pengawasan di UU Nomor 23 Tahun 2014 diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rincian dimaksud diantaranya terkait dengan bentuk pembinaan dan pengawasan yakni fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Secara lebih detail diatur pula tata cara pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari koordinasi dan perencanaan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah berkinerja rendah, serta sanksi administrasi.

Namun demikian, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan secara maksimal. Selain itu, terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah konsep perizinan berusaha termasuk pembinaan dan pengawasannya, serta ditetapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mempengaruhi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, tampaknya memberikan dampak terhadap pembinaan dan pengawasan.

Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 menyampaikan beberapa arahan terkait pentingnya peran pengawasan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program-program pemerintah perlu betul-betul dirasakan manfaatnya kepada masyarakat. Melihat masih terdapat berbagai permasalahan seperti dalam penyerapan dan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta penanganan penurunan angka kemiskinan yang belum tepat sasaran, Presiden menyampaikan bahwa pengawasan bukan sekadar prosedur namun harus berorientasi hasil yang produktif. Presiden juga mengingatkan agar seluruh daerah transparan dan jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.1.4.2 Tahapan dan Jenis Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

Menurut Fahmi (2020:86) kualitas pengawasan juga sangat ditentukan oleh tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendahuluan Sebelum Kegiatan Dilaksanakan (*Feed Forward*): Pengawasan jenis ini dilakukan sebelum kegiatan atau proses dimulai. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dan memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan dengan benar, sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang diinginkan.
2. Pengawasan Kegiatan Sedang Dilaksanakan (*Concurrent*)
Pengawasan ini dilakukan selama kegiatan atau proses berlangsung. Tujuan pengawasan concurrent adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. \
3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback*)
Pengawasan umpan balik dilakukan setelah kegiatan atau proses selesai. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengevaluasi hasil yang dicapai dan memberikan informasi mengenai sejauh mana tujuan atau standar yang ditetapkan telah tercapai. Feedback ini digunakan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki di masa depan.

Sedangkan menurut Bharoto (2021:7) terdapat beberapa jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahannya tanpa melalui perantara atau tanpa melalui pendelegasian wewenang.
2. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung atau melalui pendelegasian wewenang.
3. Pengawasan Formal
Pengawasan formal ialah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan yang mencakup formalitas atas dasar ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pengawasan Informal
Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak disertai melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan Informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan tidak resmi (pribadi).
5. Pengawasan Teknik (Teknik Control)
Pengawasan teknik ialah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik misalnya pemeriksaan terhadap pembangunan gedung dan pemeriksaan kesehatan rakyat di desa dan sebagainya.

2.1.4.3 Indikator Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

Menurut Rachman (2018:23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Menurut Rachman (2018:23) Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya

2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu ini adalah karena peneliti ingin membandingkan atau perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian dari Suryani & Hidayat (2023) dengan judul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa dengan moderasi Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa, sedangkan partisipasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa. Analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi transparansi terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi akuntabilitas, partisipasi dan kompetesnsi aparatur terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.

Ningsih (2020) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi Pada Kecamatan Geumpang, Mane, Dan Tangse Kabupaten Pidie). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

partisipasi masyarakat, kapasitas aparat gampong, dan pengawasan BPG berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik partisipasi dan kapasitas aparat gampong, semakin optimal pengelolaan dana gampong dan semakin efektif pengawasan BPG maka akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan gampong.

Tumbel (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, manun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.

Firdaus (2019) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis diperoleh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat meningkat maka pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sidoharjo semakin baik.

Perdana (2019) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa,

komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten Bantul.

Aulia (2020) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa dengan moderasi Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat (Suryani & Hidayat, 2023)	Metode kuantitatif	Hasil penelitian analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa, sedangkan partisipasi dan kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa.	Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong Kapasitas aparatur gampong Partisipasi masyarakat Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Teknik pengumpulan data	Variabel SPI Lokasi penelitian Populasi dan Sampel Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi Pada Kecamatan Geumpang, Mane, Dan Tangse Kabupaten Pidie). (Ningsih, 2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, dan pengawasan BPG berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.	- Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong - Kapasitas aparatur gampong - Partisipasi masyarakat - Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong - Teknik pengumpulan data	- Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data
3	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (Tumbel, 2020)	Metode kualitatif	Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah stafstaf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala jaga dan diikuti beberapa masyarakat, manun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat.	- Kapasitas aparatur gampong	- Teknik analisis data - Lokasi penelitian - Analisis data

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Firdaus, 2019)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis diperoleh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat meningkat maka pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Sidoharjo semakin baik.	- Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong - Partisipasi masyarakat - Teknik pengumpulan data	- Variabel transparansi - Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data
5	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. (Perdana, 2019)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten Bantul.	- Pengelolaan dana desa - Partisipasi masyarakat - Teknik pengumpulan data	- Variabel pemanfaatan teknologi, Komitmen organisasi, Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa - Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data

No	Judul dan Nama Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota (Aulia, 2020)	Metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Di Kabupaten 50 Kota.	- Pengelolaan dana desa - Partisipasi masyarakat - Teknik pengumpulan data	- Variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi - Lokasi penelitian - Populasi dan Sampel - Analisis data

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Masyarakat Gampong merupakan bagian dari sasaran pembangunan nasional. Guna menunjang kesejahteraan masyarakat gampong, gampong mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten sebagai bentuk pendapatan gampong yang berbentuk Anggaran Dana Gampong (ADG). Kebijakan ADG memberikan kewenangan kepada gampong untuk mengelola keuangannya sendiri.

Pengelolaan ADG dilaksanakan secara partisipatif yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif didalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Singkatnya, partisipasi masyarakat menjadi titik strategis dalam pengelolaan ADG. Partisipasi

masyarakat pada dasarnya berperan penting didalam menciptakan keadaan yang lebih adil, partisipatif, dan akuntabel juga merupakan salah satu upaya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya pada level pemerintahan gampong. Suryani & Hidayat (2023), menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah gampong cukup tinggi, namun dalam pengelolaannya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum terjadi secara langsung.

2.3.2 Hubungan Kapasitas Aparatur Gampong dengan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Aparatur merupakan salah satu faktor terpenting sebagai penunjang pemerintah. Tugas utama dari aparatur adalah sebagai pelayanan masyarakat dan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintahan. Tanpa adanya aparatur, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan. Mengingat begitu pentingnya peran aparatur maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparatur itu sendiri baik melalui pengembangan aparatur dengan pelatihan maupun dengan berbagai hal lainnya.

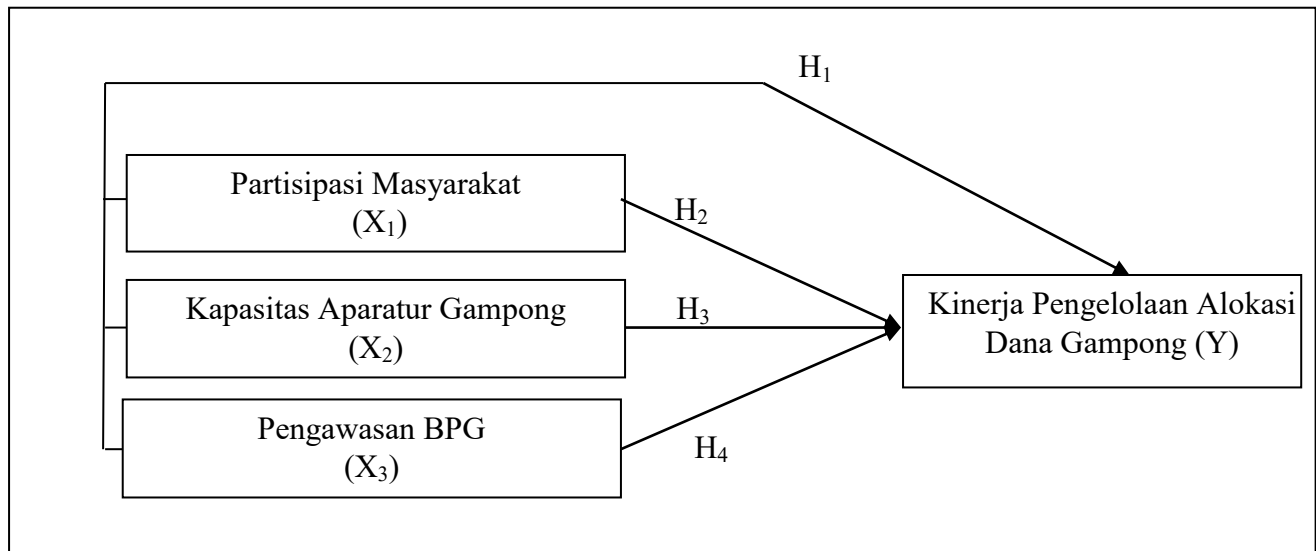
Terlepas dari kenyataan masih banyaknya aparatur gampong yang kompetensinya masih kurang memadai akibat prasyarat pendidikan dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para aparatur gampong, maka dalam rangka implementasi undang-undang gampong yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintahan gampong untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas aparatur gampong

sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah gampong dengan baik.

2.3.3 Hubungan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dengan Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Peran BPG dalam pengelolaan dana gampong antara lain menyampaikan gagasan mengenai pengelolaan dana gampong sebagai wujud penampungan aspirasi masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan dana gampong dengan pertimbangan kepala gampong. Pengawasan dan pemantauan dalam mengelola dana gampong dilakukan BPG secara langsung dan berjalan sesuai apa yang diharapkan bersama kepala dan perangkat gampong, serta kelompok masyarakat dari awal sampai selesai. BPG juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPG yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja gampong kepada kepala gampong selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong. BPG wajib menyampaikan laporan karena BPG juga menggunakan dana dari APBG. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas BPG juga membuat laporan penggunaan keuangannya. Laporan administrasi keuangan BPG disampaikan secara tertulis.

Berdasarkan hubungan antara variabel yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hubungan antara variabel penelitian dapat digambarkan pada Gambar 2.1;



Sumber: Data diolah (2024)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah:

- H₁: Partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).
- H₂: Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)
- H₃: Kapasitas aparatur gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)

H₄: Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2021:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu:

3.1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh antar variabel. penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah metode analisis korelasional, yang tujuannya untuk mencari hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dan seberapa kuat hubungan tersebut. Penelitian ini juga merupakan penelitian kausal-komparatif. Kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.

3.1.4. Horizon Waktu

Penelitian deskriptif berdasarkan rentang waktu (*on shoot study*). *On shoot study* merupakan penelitian yang hanya dilakukan pada satu periode terhadap berbagai sampel dalam populasi. Berdasarkan horizon waktu, maka data penelitian dikumpulkan melalui satu titik waktu (*one shot study*) dengan tahun pengamatan 2024 dan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Horison Waktu Penelitian

Ketrangan	Juli 2024	September 2024	November 2024	November 2024	Desember 2024	Januari 2025
Pengajuan Judul Proposal						
Penyusunan Proposal						
Pembagian Kuisisioner						
Penyusunan Skripsi						
Sidang Skripsi						

Sumber: Data diolah, 2024

3.1.4. Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. `

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020:80). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur dan masyarakat masing-masing di Gampong yang ada di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie yang terdiri dari 28 Gampong. Metode sampel jenuh atau sensus dimana seluruh elemen populasi dijadikan sampel, sehingga penelitiannya merupakan penelitian sensus/sampling jenuh. Dimana seluruh jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 84 aparatur desa dan masyarakat desa di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan Supranto (2021). Metode sensus dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*), atau sering disebut parameter (Supranto, 2021). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 84 aparatur desa di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie yang terdiri Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa serta masyarakat. Jumlah aparatur masing-masing Gampong yang ada di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Nama Gampong Di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie

No	Gampong	Kaur Keuangan	Sekretaris Gampong	Masyarakat	Jumlah Sampel
1	Dayah Tuha	1	1	1	3
2	Dayah Baroh	1	1	1	3
3	Bintang Hu	1	1	1	3
4	Pulo Tukok	1	1	1	3
5	Pulo Bungong	1	1	1	3
6	Geunteng Barat	1	1	1	3

No	Gampong	Kaur Keuangan	Sekretaris Gampong	Masyarakat	Jumlah Sampel
7	Geunteng Timur	1	1	1	3
8	Calong Cut	1	1	1	3
9	Glumpang Lhee	1	1	1	3
10	Aron	1	1	1	3
11	Tuha	1	1	1	3
12	Dayah	1	1	1	3
13	Mesjid	1	1	1	3
14	Meucat	1	1	1	3
15	Teupin Raya	1	1	1	3
16	Rungkom	1	1	1	3
17	Mee	1	1	1	3
18	Pulo Pande	1	1	1	3
19	Seulatan	1	1	1	3
20	Alue Lada	1	1	1	3
21	Teupin Jeue	1	1	1	3
22	Neuheun	1	1	1	3
23	Crueng	1	1	1	3
24	Kareung	1	1	1	3
25	Kulee	1	1	1	3
26	Kulam	1	1	1	3
27	Awe	1	1	1	3
28	Pasi Beurandeh	1	1	1	3
Jumlah		28	28	28	84

Sumber: Kecamatan Batee Kabupaten Pidie (2024).

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat dan reliabel. Sumber data yang digunakan antara lain yaitu data primer diperoleh dari dokumentasi dan daftar pertanyaan (kuisisioner) (Sugiyono, 2020:139). Untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup, yaitu pertanyaan yang dirancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka melalui artikel majalah pemasaran maupun yang diambil dari internet untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membagikan langsung kuisioner kepada responden. Kuisioner tersebut berisi pertanyaan ataupun pernyataan yang berhubungan dengan variabel-variabel partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

3.4 Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 4 variabel, yaitu masing-masing variabel terikat yaitu kinerja pengelolaan alokasi dana gampong, variabel bebas yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong. Variabel-variabel tersebut dapat dilihat melalui Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Dependen Variabel					
1	Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Y)	Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. (Jumali, 2021:86)	Pemanfaatan sistem komputer	Likert	A-A5
			Layanan komputer		
			Produktif dan kreatif		
			Efektivitas dan produktivitas		
			Sarat layanan		
			Lebih produktif		

Lanjutan Tabel 3.3

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Independen Variabel					
1	Partisipasi masyarakat (X ₁)	Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Marschall, 2018)	Adanya kontribusi	Likert	B1-B4
			Adanya pengorganisasian		
			Peran masyarakat dan aksi masyarakat,		
			Motivasi masyarakat dan tanggung jawab masyarakat		
2	Kapasitas aparatur gampong (X ₂)	Kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Wibowo, 2020:87)	Motif	Likert	C1-C5
			Sifat		
			Konsep diri		
			Pengetahuan		
			Keterampilan		
3	Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong (X ₃)	Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) (Rachman, 2018: 23).	Meningkatkan disiplin dan pencapaian sasaran	Likert	D1-D3
			Berkurangnya penyalahgunaan wewenang		
			Berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar		

Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5 dengan kategori menurut Arikunto (2018:66) adalah seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Skala Likert

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

3.5 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program bantuan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 22. Adapun persamaan model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja pengelolaan alokasi dana gampong

X₁ = Partisipasi masyarakat

X₂ = Kapasitas aparatur gampong

X₃ = Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

a = Konstanta

b = Parameter Regresi

e = *Error Term*

3.6 Pengujian Data

Uji reliabilitas dan validitas serta uji asumsi klasik adalah uji terhadap instrumen penelitian yang akan menyajikan data kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang bersifat kuantitatif sehingga harus dapat memberikan kebenaran dan kepercayaan melalui suatu set uji kehandalan dan validitas (Sugiyono, 2020).

3.6.1 Pengujian Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi, keperluan dan tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa kuesioner dianggap valid jika kuesioner tersebut benar-benar dapat menyajikan suatu set data mengenai perilaku dan aktivitas responden sebagaimana yang diharapkan. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) diantara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*) (Sugiyono, 2020).

3.6.2 Pengujian Kehandalan (Reliability)

Reliabilitas instrument adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh kuesioner, meskipun digunakan secara berulang-ulang. Pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *Cronbach Alpha* masing-masing variabel yang terlibat. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Uji ini dimaksudkan untuk menunjukkan banyaknya variansi atau perbedaan yang diharapkan pada seperangkat pengukuran yang dilakukan secara

berulang-ulang terhadap suatu objek. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,60 (Malhotra, 2018).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data menurut Ghazali (2020:110) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis gambar berupa plot dan uji statistik dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness*.

Kenormalan data-data dapat dilihat dari tampilan gambar normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2020:110).

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghazali (2020:91) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Bila ternyata dalam model regresi terdapat multikolinearitas, maka harus menghilangkan variabel *independent* yang mempunyai korelasi tinggi. Ghazali (2020:91) juga menambahkan jika korelasi antar variabel *independent* tinggi yaitu di atas 0,90 maka terdapat multikolinearitas. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 10% dan nilai VIF lebih besar dari 10 berarti ada multikolinearitas.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2020:91) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot* antara SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis merupakan pelaksanaan alternatif jawaban untuk menjawab ke empat rumusan masalah dalam penelitian ini. Rancangan tersebut dalam penelitian alternatif (H_a), yaitu,

H_{a1} = Partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)

H_{a2} = Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie)

H_{a3} = Kapasitas aparatur gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

H_{a4} = Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

3.7.1 Uji Parsial (Uji t)

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara individu (parsial) :

H_{o2} : Jika $\beta_1 = 0$, maka H_o diterima (H_a ditolak), artinya partisipasi masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

H_{o2} : Jika $\beta_1 \neq 0$ maka H_a diterima (H_o ditolak), artinya partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

H_{o3} : Jika $\beta_2 = 0$, maka H_o diterima (H_a ditolak), artinya komitmen organisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

H_{o3} : Jika $\beta_2 \neq 0$ maka H_a diterima (H_o ditolak), artinya komitmen organisasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

H_{o4} : Jika $\beta_3 = 0$, maka H_o diterima (H_a ditolak), artinya pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

H_{o4} : Jika $\beta_3 \neq 0$ maka H_a diterima (H_o ditolak), artinya pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja

pengelolaan alokasi dana gampong (Studi pada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie).

3.7.2 Uji Secara Simultan

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis secara bersama-sama

- H_{01} : Jika $\beta_i (i = 1, 2, 3) = 0$: maka H_0 diterima (H_a ditolak). Artinya bahwa, variabel *independent* partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*.
- H_{01} : Jika $\beta_i (i = 1, 2, 3) \neq 0$, : maka H_a diterima (H_0 ditolak). Artinya bahwa, variabel *independent* partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong, pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Batee adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Batee terletak di bagian tengah Kabupaten Pidie, yang berbatasan dengan beberapa kecamatan lain, serta memiliki akses ke jalan raya yang menghubungkan wilayah Kabupaten Pidie dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Aceh. Letaknya yang strategis memungkinkan kecamatan ini untuk berkembang dalam berbagai sektor. Kecamatan Batee memiliki luas wilayah yang cukup besar, mencakup berbagai desa dengan karakteristik yang bervariasi. Meskipun angka pastinya dapat berubah, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak, dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan.

Penduduk Kecamatan Batee mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian, seperti bertani padi, kelapa, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam sektor peternakan dan perikanan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki kecamatan ini mendukung kegiatan ekonomi berbasis agraris. Di samping sektor pertanian, terdapat pula kegiatan perdagangan yang berkembang di pasar-pasar tradisional, yang menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat setempat. Infrastruktur di Kecamatan Batee mulai berkembang meskipun masih terdapat beberapa area yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jaringan komunikasi. Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup

masyarakat. Masyarakat Kecamatan Batee masih menjaga kearifan lokal dan tradisi Aceh, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari adat istiadat, upacara keagamaan, hingga seni budaya. Masyarakat di sini mayoritas beragama Islam, dan kegiatan keagamaan sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan Dana Desa di Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di tingkat desa, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batee dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah desa dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat setempat, baik melalui musyawarah desa maupun mekanisme yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi. Proses perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa biasanya dimulai dengan musyawarah desa untuk menyusun rencana kegiatan yang akan didanai. Setiap desa di Kecamatan Batee memiliki kebijakan dan prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing.

Pemerintah desa di Kecamatan Batee diharapkan terus mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendorong pembangunan yang merata, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kapasitas pemerintahan desa dalam melaksanakan program pembangunan. Secara keseluruhan, perkembangan Dana Desa di Kecamatan Batee menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas penggunaan dana desa.

4.1.2 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan serta masa kerja yang terlihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Umur		
	a. 20-25 Tahun	1	1,2
	b. 26-31 Tahun	14	16,7
	c. 32-37 Tahun	14	16,7
	d. 38-43 Tahun	19	22,6
	e. 44-49 Tahun	25	29,8
	f. > 50 Tahun	11	13,1
Total		84	100
2	Jenis kelamin		
	a. Pria	67	79,8
	b. Wanita	17	20,2
Total		84	100
3	Status Perkawinan		
	a. Belum Menikah	2	2,4
	b. Menikah	82	97,6
Total		84	100
4.	Pendidikan Terakhir		
	a. SMA	39	46,4
	b. Diploma	13	15,5
	c. Sarjana	32	38,1
	d. Pasca Sarjana	0	0
Total		84	100
5.	Pendapatan Rata-rata Perbulan		
	a. < Rp 2.840.000	28	33,3
	b. Rp 2.600.000-Rp 4.000.000	45	53,6
	c. Rp 4.100.000-Rp 5.840.000	11	13,1
	d. > Rp 5.840.000	0	0
Total		84	100

Sumber: Data diolah, 2024

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berusia dibawah 25 tahun yaitu sebanyak 1 responden atau 1,2%, yang berusia antara 26 sampai dengan 31 tahun yaitu sebanyak 14 responden atau 16,7%, yang berusia antara 32 sampai dengan 37 tahun yaitu sebanyak 14 responden atau 16,7%, yang berusia antara 38 sampai dengan 43 tahun yaitu sebanyak 19 responden atau 22,6%, yang berusia antara 44 sampai dengan 49 tahun sebanyak 25 responden atau 29,8% dan yang berusia di atas 51 tahun sebanyak 11 responden atau 13,1%

Dari Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 67 responden atau 79,8% dan responden berjenis kelamin wanita yaitu sebanyak 17 responden atau 20,2%. Kemudian Karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat dijelaskan yang belum menikah adalah sebanyak 2 responden atau 2,4% dan yang sudah menikah sebanyak 82 responden atau 97,6%

Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 39 responden atau 46,4%, yang berpendidikan terakhir Diploma yaitu sebanyak 13 responden atau 15,5% dan yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 32 responden atau 38,14%.

Mengenai tingkat pendapatan responden dapat dijelaskan bahwa sebanyak 28 responden atau 33,3% dengan pendapatan perbulan sebesar dibawah Rp 2.500.000, sebanyak 45 responden atau 53,6% dengan pendapatan perbulan sebesar Rp 2.600.000-Rp 4.000.000 dan sebanyak 11 responden atau 13,1% dengan pendapatan sebesar Rp 4.100.000-Rp 5.500.000.

4.1.3. Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini mengamati tiga variabel bebas (*independent variabel*) yaitu variabel partisipasi masyarakat (X_1), variabel kapasitas aparatur gampong (X_2) dan variabel pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) dan juga mengamati satu variabel terikat (*dependent variable*) yaitu kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Y).

4.1.3.1. Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Penjelasan responden tentang variabel kinerja pengelolaan alokasi dana gampong pada dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Menggunakan sistem komputer pada kantor dapat meningkatkan kualitas kerja	1	1,2	8	9,5	25	298	37	44,0	13	15,5	3,63
2	Aparatur selalu berusaha memahami data dan informasi yang menjadi tanggung jawab aparatur	3	3,6	3	3,6	19	22,	36	42,9	23	27,4	3,87
3	Aktivitas yang umum dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi	4	4,8	7	8,3	13	15,5	42	50,0	18	21,4	3,75
4	Aparatur yakin dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif	3	3,6	1	1,2	17	20,2	46	54,8	17	20,2	3,87
5	Sistem komputer yang aparatur manfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja aparatur	5	6,0	19	22,6	15	17,9	32	38,1	13	15,5	3,35
6	Setelah menggunakan sistem komputer aparatur merasa lebih produktif	1	1,2	8	9,5	25	298	37	44,0	13	15,5	3,63
Rerata												3,68

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.2 pada indikator pertama bahwa menggunakan sistem komputer pada kantor dapat meningkatkan kualitas kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,63. Aparatur selalu berusaha memahami data dan informasi yang menjadi tanggung jawab aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,87. Aktivitas yang umum dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,75. Aparatur yakin dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,87. Sistem komputer yang aparatur manfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,35. Setelah menggunakan sistem komputer aparatur merasa lebih produktif diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,63. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel kinerja pengelolaan alokasi dana gampong sebesar 3,68 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.1.3.2. Variabel Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.	3	3,6	0	0	18	21,4	48	57,1	15	17,9	3,86

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
2	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi pengelolaan dana desa	8	9,5	3	3,6	14	16,7	40	47,6	19	22,6	3,70
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa	5	6,0	5	6,0	14	16,7	44	52,4	16	19,0	3,73
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur	2	2,4	5	6,0	19	22,6	38	45,2	20	23,8	3,82
Rerata												3,78

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,86. Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,70. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,73. Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,82. Dapat disimpulkan bahwa

nilai rerata pada variabel partisipasi masyarakat Kerja sebesar 3,78 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.1.3.3. Variabel Kapasitas Aparatur Gampong

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel kapasitas aparatur gampong dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kapasitas Aparatur Gampong

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Aparatur gampong memperoleh kehormatan sebagai aparatur yang layak diterima masyarakat	4	4,8	1	1,2	9	10,7	33	39,3	37	44,0	4,17
2	Aparatur memiliki sifat kerja yang baik dalam pengelolaan dana desa	3	3,6	6	7,1	15	17,9	38	45,2	22	26,2	3,83
3	Keberhasilan yang aparatur capai merupakan hasil dari kegigihan aparatur bekerja sebagai konsep dirinya	2	2,4	5	6,0	23	27,4	37	44,0	17	20,2	3,74
4	Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur sudah baik	2	2,4	2	2,4	26	31,0	42	50,0	12	14,3	3,71
5	Aparatur gampong memiliki keterampilan kerja yang baik	4	4,8	1	1,2	9	10,7	33	39,3	37	44,0	4,15
Rerata												3,92

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu aparatur gampong memperoleh kehormatan sebagai aparatur yang layak diterima masyarakat diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,17. Aparatur memiliki sifat kerja yang baik dalam pengelolaan dana desa diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,83. Keberhasilan yang aparatur

capai merupakan hasil dari kegigihan aparatur bekerja sebagai konsep dirinya diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,74. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur sudah baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,71. Aparatur gampong memiliki keterampilan kerja yang baik diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,15. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel kapasitas aparatur gampong sebesar 3,92 artinya responden menyatakan setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.1.3.4. Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong

No	Item pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Rata-Rata
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur, prestasi dan pencapaian sasaran	4	4,8	1	1,2	10	11,9	49	58,3	20	23,8	3,85
2	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat berkurangnya penyalahgunaan wewenang	5	6,0	4	4,8	12	14,3	43	51,2	20	23,8	3,82
3	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat mengurangi tingkat pemborosan dan pungutan liar	3	3,6	4	4,8	12	14,3	42	50,0	23	27,4	3,93
Rerata												3,90

Sumber : Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan dari indikator yang pertama bahwa Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur, prestasi dan pencapaian sasaran diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,85. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat berkurangnya penyalahgunaan wewenang diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,82. Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat mengurangi tingkat pemborosan dan pungutan liar diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,93. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel variabel pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong sebesar 3,90 artinya responden menyatakan kurang setuju karena skala likert mendekati pada satuan angka 4.

4.1.4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

4.1.4.1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara stastitik, yaitu dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficien of correlation* dengan bantuan SPSS. Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5 % yaitu di atas 0,220, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Ini berarti data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Hasil Uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

No pertanyaan		Variabel	Koefisien korelasi	Nilai kritis 5 % (N=84)	Ket
1	A1	Y	0,703	0,220	Valid
2	A2		0,616	0,220	Valid
3	A3		0,729	0,220	Valid
4	A4		0,636	0,220	Valid
5	A5		0,476	0,220	Valid
6	A6		0,703	0,220	Valid
7	B1	X ₁	0,605	0,220	Valid
8	B2		0,728	0,220	Valid
9	B3		0,727	0,220	Valid
10	B4		0,452	0,220	Valid
11	C1	X ₂	0,817	0,220	Valid
12	C2		0,723	0,220	Valid
13	C3		0,733	0,220	Valid
14	C4		0,473	0,220	Valid
15	C5		0,817	0,220	Valid
16	D1	X ₃	0,635	0,220	Valid
17	D2		0,809	0,220	Valid
18	D3		0,709	0,220	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan semuanya valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi *product moment* yaitu sebesar 0,220 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid untuk dilanjutkan penelitian yang lebih mendalam.

4.1.4.2. Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan internal *consistency* atau derajat ketepatan jawaban. Untuk pengujian ini digunakan *Statistical Packaged for Social Sciences* (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi

hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian (Alpha)

No	Variabel	Item Variabel	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Y)	6	0,824	Handal
2.	partisipasi masyarakat (X_1)	4	0,804	Handal
3.	kapasitas aparatur gampong (X_2)	5	0,879	Handal
4.	pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3)	3	0,846	Handal

Sumber : data diolah 2024

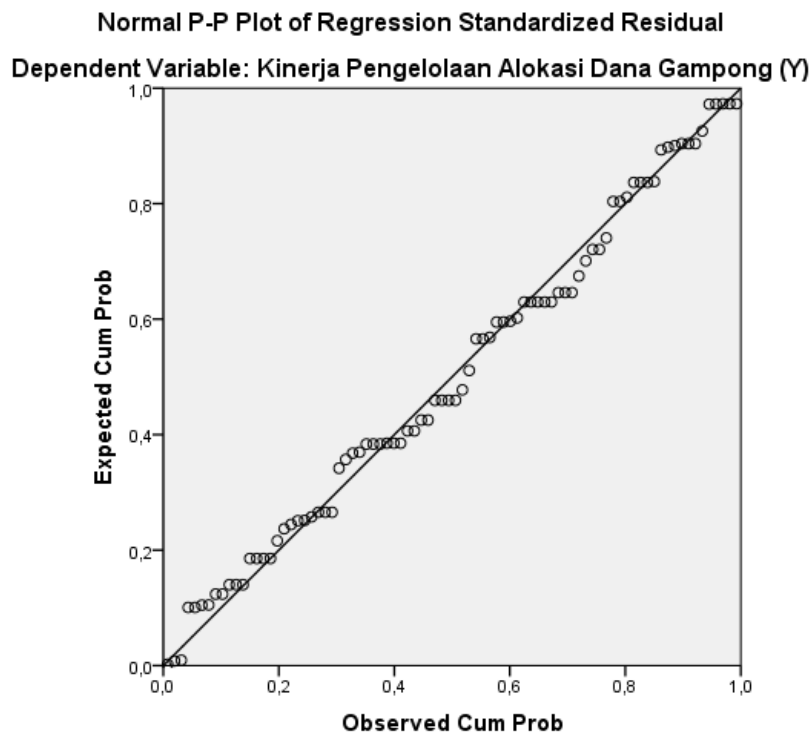
Hasil uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach Alpha, nilai *cronbach alpa reliabilitas* yang baik adalah yang makin mendekati 1, Reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat diterima dan reliabilitas dengan *cronbach alpa* 0,80 atau diatasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa reliabilitas variabel keputusan pembelian berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen, diketahui bahwa hasil pengujian variabel partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

4.1.4.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.3.1 Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data, dalam penelitian ini hanya akan dideteksi melalui Analisis Grafik yang dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan SPSS. Data yang normal ditandai dengan sebaran titik-titik data diseputar garis diagonal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan Gambar 4.1 tersebut dapat dikatakan bahwa data yang digunakan menunjukkan indikasi normal. Analisis dari grafik diatas terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. “Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi-asumsi normalitas”. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kinerja karyawan berdasarkan masukan variabel independen.

4.1.4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Pada model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.8:

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Toleransi	VIF	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,318	3,145	Non Multikolinieritas
Kapasitas Aparatur Gampong	0,492	2,032	Non Multikolinieritas
Pengawasan BPG	0,322	3,103	Non Multikolinieritas

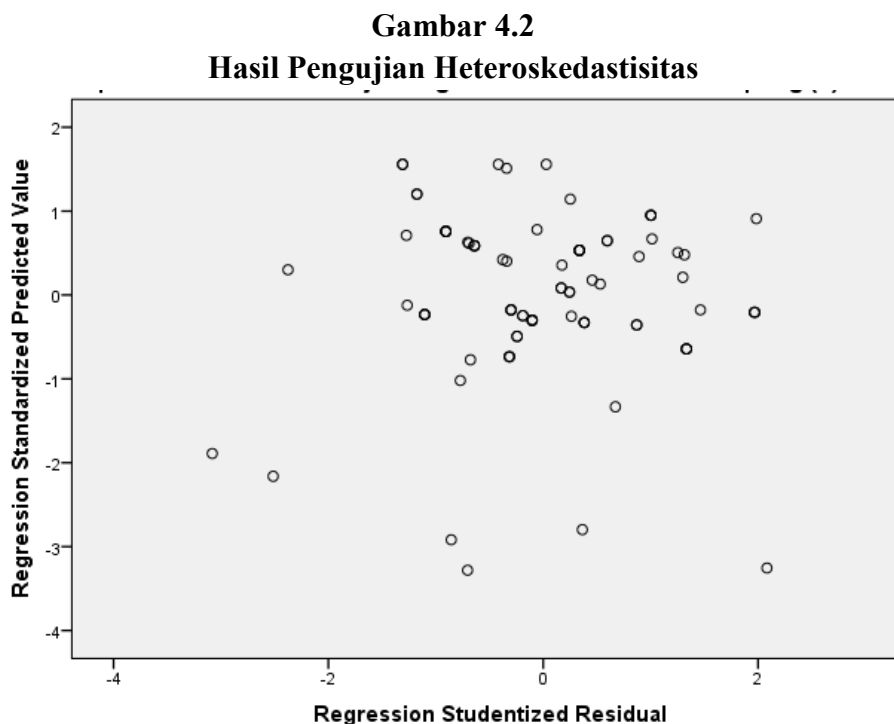
Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.8 maka dapat menunjukkan bahwa tidak ada satu variable independen yang memiliki nilai Tolerance yang kurang dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antara variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

4.1.4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dengan mengamati pola yang terdapat pada Scatterplot, dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 4.2:



Sumber: Data diolah (2024)

Dari Gambar 4.2 uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor partisipasi masyarakat (X_1), kapasitas aparatur gampong (X_2) dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3)

berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.9
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,509	,240		2,125	,037
	partisipasi masyarakat (X1)	,214	,091	,232	2,352	,013
	kapasitas aparatur gampong (X2)	,308	,084	,309	3,652	,000
	pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X3)	,407	,087	,491	4,705	,000

a. Dependent Variable: kinerja pengelolaan alokasi dana gampong (Y)

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = 0,509 + 0,214X_1 + 0,308X_2 + 0,407X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 0,509 artinya bila mana partisipasi masyarakat (X_1), kapasitas aparatur gampong (X_2) dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3), dianggap konstan, maka kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie adalah sebesar 0,509 pada satuan skala likert
- b. Koefisien regresi partisipasi masyarakat (X_1) sebesar 0,214. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel partisipasi masyarakat akan meningkatkan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie sebesar 21,4% dengan asumsi variabel kapasitas

aparatur gampong (X_2) dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) dianggap konstan.

- c. Koefisien regresi kapasitas aparatur gampong (X_2) sebesar 0,308. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel kapasitas aparatur gampong secara relatif akan meningkatkan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie sebesar 30,8% dengan asumsi variabel partisipasi masyarakat (X_1), dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) dianggap konstan
- d. Koefisien regresi pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) sebesar 0,407. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara relatif akan meningkatkan kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. sebesar 40,7% dengan asumsi variabel partisipasi masyarakat (X_1) dan kapasitas aparatur gampong (X_2), dianggap konstan.

4.1.5.2. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat diketahui tingkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat antara lain.

Tabel 4.10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,848 ^a	0,719	0,708	0,38285

a. Predictors: (Constant), pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X3), kapasitas aparatur gampong (X2), partisipasi masyarakat (X1)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien korelasi (R) dalam penelitian diperoleh nilai sebesar 0,848 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 84,8%. Artinya faktor partisipasi masyarakat (X_1), kapasitas aparatur gampong (X_2), dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

Sementara itu koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,708 artinya bahwa sebesar 70,8% perubahan-perubahan dalam variabel terikat (kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.) dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan partisipasi masyarakat (X_1), kapasitas aparatur gampong (X_2) dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X_3). Sedangkan selebihnya sebesar 29,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar tiga variabel seperti dijelaskan di atas seperti kemampuan aparatur, kepercayaan masyarakat dan sistem pengendalian internal.

4.1.5.3. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara bersama maupun secara parsial

terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

4.1.5.3.1. Pengujian Secara Bersama-Sama

$H_1 : \beta_1 = 0,214, \beta_2 = 0,308, \beta_3 = 0,407$, maka $\beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0, \beta_3 \neq 0$: Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

4.1.5.3.2. Pengujian Secara Parsial

$H_2 : H_1 : \beta_1 = 0,214, \beta_1 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

$H_3 : H_2 : \beta_2 = 0,308, \beta_2 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya kapasitas aparatur gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

$H_3 : H_3 : \beta_3 = 0,407, \beta_3 \neq 0$, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis nul (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, artinya pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Pengujian secara bersama-sama dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong bersama terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Suryani & Hidayat (2023) dan Ningsih (2020) karena variabel yang diteliti sama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong yaitu partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong.

4.2.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan alokasi dana gampong memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi sehingga dana digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pengelolaan dana akan lebih terarah sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang lebih merata dan tepat sasaran. Hal ini juga

meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan proyek atau program yang didanai. Namun jika partisipasi masyarakat tidak dikelola dengan baik, bisa muncul konflik antar kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda. Ketidakselarasan antara prioritas pembangunan yang diinginkan masyarakat dan yang direncanakan oleh pemerintah desa juga dapat menghambat kinerja pengelolaan dana. Hal ini sejalan dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Firdaus (2019) karena variabel yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

4.2.3. Pengaruh Kapasitas Aparatur Gampong Manusia terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Kapasitas aparatur gampong, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi desa, sangat menentukan keberhasilan dalam mengelola Alokasi Dana Gampong. Aparatur yang terlatih akan lebih efisien dan efektif dalam menyusun anggaran, melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dana. Dengan kapasitas yang baik, aparatur gampong dapat lebih profesional dalam mengelola anggaran, memitigasi risiko penyalahgunaan dana, serta memastikan keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Ningsih (2020) karena variabel yang diteliti akuntabilitas sama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

4.2.4. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

BPG memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Gampong. Pengawasan yang dilakukan oleh BPG akan mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian dari sebelumnya yaitu penelitian dari Ningsih (2020) karena variabel yang diteliti pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong sama-sama berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPG, transparansi penggunaan dana dapat terjaga dengan baik, serta aparat desa lebih terjaga dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jika BPG tidak melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik atau tidak memiliki independensi, hal ini dapat menyebabkan dana desa tidak digunakan dengan efisien dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Tanpa pengawasan yang efektif, tidak ada mekanisme yang baik untuk melakukan evaluasi terhadap proyek yang telah dilaksanakan, yang dapat mengakibatkan proyek atau program yang tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat, kapasitas aparatur gampong dan pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.
2. Partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie
3. Kapasitas aparatur gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.
4. Pengawasan Badan Permasyarakatan Gampong secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana gampong di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada Kecamatan Batee Kabupaten Pidie sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan aparat harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong. Edukasi ini bisa mencakup pemahaman tentang transparansi, perencanaan

anggaran, dan manfaat partisipasi dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Membentuk forum-forum diskusi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan desa. Hal ini dapat menciptakan keterbukaan dan memungkinkan masukan dari berbagai kelompok dalam masyarakat, sehingga pengelolaan dana lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Aparatur gampong perlu dilatih secara berkala dalam bidang manajemen keuangan, administrasi, dan pengelolaan proyek. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan Alokasi Dana Gampong secara tepat dan efisien.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPG harus independen dan objektif. Oleh karena itu, perlu ada pemisahan yang jelas antara fungsi pemerintahan dan pengawasan di tingkat gampong. BPG harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang melibatkan Alokasi Dana Gampong.
4. Meningkatkan komunikasi antar pihak terkait (masyarakat, aparatur gampong, dan BPG) adalah hal yang penting agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan baik. Pertemuan rutin atau rapat koordinasi antara pihak-pihak ini dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulia, Putri. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-15*
- Bharoto, M. H. (2021) Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon. *Artikel Manajemen*
- Fahmi, Irham (2020) *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi Dan Kasus*. Alfabeta, Bandung.
- Firdaus. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 1-13.
- Gary, D., (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi Kesepuluh jilid Satu. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 21. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Goodhue, D L (2020) *Understanding User Evaluation Of Information System*, Management Science. Desember, 1827-1844
- Hair, Joseph F. Jr. *et al.* (2020). *Multivariate Data Analysis*. Pearson. Education Limited. Harlow. England.
- Halim dan Kusufi. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Sri., (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. *Skripsi thesis, Universitas Jenderal Soedirman*.
- Harris, M. I., Sjahruddin, H., & Themba, O. S. (2020). Kontribusi Rasio Aktivitas dan Ukuran Perusahaan pada Rentabilitas PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, Vol.3, No.3: 2581- 2696, 219-229.

Hasibuan, M.S.P., (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

<https://www.acehonline.com>

Irmawati, W., (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian terhadap Perencanaan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Jenderal Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana.

Jumali, M.dkk. (2021). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta Salemba Empat

Malhotra, N. K. (2018) *'Marketing Research: An Applied Orientation - Naresh*

Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2020). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Rafika Aditama

Marschall B. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Alihbahasa : Kikin Sakinah

Moeheriono. (2020). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada.

Mulyadi. (2020). *Auditing*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Murhaini, Suriansyah (2018) *Manajemen Pengawasan Pemerintah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ningsih, E. S. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kapasitas Aparatur Gampong Dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Studi Pada Kecamatan Geumpang, Mane, Dan Tangse Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5 (3), 572-583.

Nuryadi, I., Isma, A., & Istiqomah, A. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Sumber Agung*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol.1, No.2, 160-169.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Nagari dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Indeks Desa Membangun*

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Perdana, Khaeril. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1, No. 1, Hlm 1-11.*

Rachman, A. A. (2018). *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*,. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.

Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Santoso, Singgih. (2018). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sekaran, U. (2021). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Slamet, M. (2020). *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press

Soeprapto Riyadi. (2021). *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, World Bank.

Sugiyono. (2020). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suhud, Sheilla Putri (2020) *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu Pegawai Distro Di Kota Bandung*. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Sunyoto. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Buku.

Supomo dan Indriantoro, Nur (2021). *Metodologi Penelitian Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta.

Supranto. (2021). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suryani, M. K., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa dengan moderasi Sistem Pengendalian Internal Pada Desa Di Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat. *Indonesian Journal of Business and Management*, 3 (1), 1-20.

Suryawan, I. K. (2020) Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individual dengan Insentif Sebagai Variabel Pemoderasi Pada LPD. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.23. No, 2.*

Sutrisno , Edy. (2018) *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana

- Suwatno. & Priansa, D. (2018). *Manajemen SDM dalam organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwatno., (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, Kencana (2018) *Manajemen Pemerintahan, Pustaka Reka Cipta*, Jawa Barat
- Syahrani (2018). Analisis Kinerja Aparatur Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Nunukan. *Journal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1624-163
- Tumbel, A. (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 1 (1), 1-16.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Wibowo. (2020). *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yuwono, S. B., dan Herwanti, S. (2016). Struktur pendapatan, tingkat kesejahteraan, dan faktor produksi agroforestri kopi pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi. *Jurnal Sylva Lestari*, 4 (1), 1-10.

NO:

Kuisisioner

Penelitian ini semata-mata bersifat ilmiah untuk mendapatkan data bagi penulis skripsi pada fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya sangat menghargai bantuan saudara-saudari yang telah menjawab semua pertanyaan dengan kondisi yang berlaku pada saudara-saudari sendiri. Berilah tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan saudara/saudari.

A. indentitas responden**1. Umur**

- a. 20-25 Tahun ☐
- b. 26-31 Tahun ☐
- c. 32-37 Tahun ☐
- d. 38-43 Tahun ☐
- e. 44-49 Tahun ☐
- f. ≥ 50 Tahun ☐

2. Jenis kelamin

- a. Pria ☐
- b. Wanita ☐

3. Status perkawinan

- a. Belum menikah ☐
- b. Menikah ☐

4. Tingkat Pendidikan

- a. SLTA ☐
- b. Diploma III ☐
- c. Sarjana (S1) ☐
- d. Pasca Sarjana (S2) ☐
- e. Doktor (S3) ☐

5. Penghasilan perbulan

- a. < Rp 2.500.000 ☐
- b. Rp. 2.600.000 - Rp. 4.000.000 ☐
- c. Rp. 4.100.000 - Rp. 5.500.000 ☐
- d. $\geq$ Rp. 5.500.000 ☐

B. Indikator Variabel

Ket : 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Kurang Setuju (KS)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

1. Variabel Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Menggunakan sistem komputer pada kantor dapat meningkatkan kualitas kerja					
2	Saya selalu berusaha memahami data dan informasi yang menjadi tanggung jawab saya					
3	Aktivitas yang umum dapat dipenuhi oleh sistem komputer organisasi					
4	Saya yakin dapat meningkatkan kinerja yang lebih produktif					
5	Sistem komputer yang saya manfaatkan sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja saya					
6	Setelah menggunakan sistem komputer saya merasa lebih produktif					

2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X₁)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa					
2	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi pengelolaan dana desa					
3	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum pengelolaan dana desa selalu melibatkan masyarakat dan Masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam konsultasi publik tentang pelaksanaan pengelolaan dana desa					
4	Masyarakat memberikan motivasi dengan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur					

3. Variabel Kapasitas Aparatur Gampong (X₂)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Aparatur gampong memperoleh kehormatan sebagai aparatur yang layak diterima masyarakat					
2	Aparatur memiliki sifat kerja yang baik dalam pengelolaan dana desa					
3	Keberhasilan yang aparatur capai merupakan hasil dari kegigihan aparatur bekerja sebagai konsep dirinya					
4	Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur sudah baik					
5	Aparatur gampong memiliki keterampilan kerja yang baik					

4. Variabel Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X₃)

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS
1	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan aparatur, prestasi dan pencapaian sasaran					
2	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat berkurangnya penyalahgunaan wewenang					
3	Dengan adanya pengawasan keuangan daerah maka dapat mengurangi tingkat pemborosan dan pungutan liar					

Lampiran 2 Data Dari Jawaban Kuesioner

NO	Karakteristik					Indikator						Y	Indikator				X1	Indikator					X2	Indikator			X3
	IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4		C1	C2	C3	C4	C5		D1	D2	D3	
1	5	1	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3,3	3	3	4	4	3,5	5	5	2	4	5	4,2	4	2	3	3
2	4	1	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3,8	3	2	4	4	3,3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4
3	5	1	2	1	1	4	4	4	5	2	5	4	5	4	5	5	4,8	5	5	4	4	4	4,4	5	5	5	5
4	3	1	2	1	1	4	3	4	3	4	3	3,5	3	4	4	4	3,8	4	4	4	3	3	3,6	4	3	4	3,7
5	5	1	2	1	2	4	5	5	4	3	4	4,2	4	4	4	5	4,3	5	5	4	4	5	4,6	4	4	4	4
6	2	1	2	1	2	4	5	4	4	2	4	3,8	4	5	4	4	4,3	5	5	5	4	4	4,6	5	4	4	4,3
7	4	1	2	1	2	3	3	3	4	5	5	3,8	5	4	4	3	4	5	4	3	3	5	4	4	5	4	4,3
8	6	1	2	1	2	4	5	4	4	3	4	4	2	4	5	4	3,8	4	5	4	4	3	4	4	5	4	4,3
9	5	1	2	3	3	3	3	4	3	4	3	3,3	3	3	4	4	3,5	5	5	2	4	5	4,2	4	2	3	3
10	4	1	2	3	2	3	4	4	4	4	4	3,8	3	2	4	4	3,3	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4
11	5	1	2	1	1	4	4	4	5	2	5	4	5	4	5	5	4,8	5	5	4	4	4	4,4	5	5	5	5
12	3	1	2	1	1	4	3	4	3	4	3	3,5	3	4	4	4	3,8	4	4	4	3	3	3,6	4	3	4	3,7
13	5	1	2	1	2	4	5	5	4	3	4	4,2	4	4	4	5	4,3	5	5	4	4	5	4,6	4	4	4	4
14	2	1	2	1	2	4	5	4	4	2	4	3,8	4	5	4	4	4,3	5	5	5	4	4	4,6	5	4	4	4,3
15	6	1	2	1	2	5	4	4	5	5	5	4,7	4	5	4	5	4,5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
16	5	1	2	3	2	4	4	5	3	3	4	3,8	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4,8	4	4	4	4
17	3	1	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1,5	5	2	2	5	3,5	3	2	2	2	5	2,8	2	2	2	2
18	4	1	2	1	2	4	5	4	4	2	4	3,8	5	5	5	4	4,8	4	4	4	5	4	4,2	4	4	4	4
19	5	1	2	1	2	4	4	4	4	2	4	3,7	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4,6	5	4	4	4,3
20	3	1	2	3	2	2	4	3	3	4	3	3,2	3	1	1	3	2	5	3	3	3	3	3,4	3	3	5	3,7
21	2	1	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1,5	5	1	1	3	2,5	5	1	3	1	1	2,2	5	1	1	2,3
22	1	1	1	1	2	5	5	5	5	5	3	4,7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
23	2	1	2	2	3	5	5	5	5	2	5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	2	2	3	2	3	4	2	4	2	4	3,2	2	4	2	3	2,8	2	4	1	3	2	2,4	4	2	4	3,3
25	2	1	2	3	1	3	4	2	4	1	4	3	2	4	4	2	3	4	4	3	2	4	3,4	4	4	2	3,3
26	5	1	2	3	2	4	4	5	4	4	4	4,2	4	4	5	4	4,3	4	4	4	4	5	4,2	4	5	5	4,7
27	6	1	2	1	1	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	4	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	6	2	2	1	2	5	5	4	4	4	4	4,3	5	5	5	4	4,8	5	4	4	4	4	4,2	4	4	5	4,3
29	4	1	2	1	1	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	3	3,3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
30	2	1	2	1	1	3	4	2	4	2	4	3,2	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3,2	4	4	4	4
31	3	1	2	3	1	2	4	1	4	3	3	2,8	4	4	4	3	3,8	1	1	1	4	4	2,2	4	4	3	3,7
32	6	1	2	1	1	3	5	4	5	4	5	4,3	3	4	4	4	3,8	5	5	4	4	5	4,6	3	4	4	3,7
33	6	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	6	1	2	3	1	3	4	3	4	4	4	3,7	4	3	3	4	3,5	4	3	3	3	3	3,2	4	4	4	4
35	5	2	2	3	1	3	5	4	5	5	4	4,3	4	4	5	4	4,3	4	4	4	3	3	3,6	4	4	3	3,7
36	5	1	2	3	2	4	4	3	4	2	4	3,5	4	4	3	3	3,5	4	4	4	4	3	3,8	3	4	4	3,7
37	2	1	2	3	3	2	3	3	3	1	3	2,5	1	1	2	2	1,5	1	1	3	3	3	2,2	1	1	1	1
38	6	2	2	1	1	2	2	2	3	1	3	2,2	1	1	2	3	1,8	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
39	6	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1,5	1	1	2	1	1,3	1	2	2	1	3	1,8	1	1	2	1,3
40	3	1	2	3	2	3	1	1	1	1	3	1,7	1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	2,6	1	1	2	1,3
41	4	1	2	3	1	4	5	5	5	3	5	4,5	4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	4,2	4	4	5	4,3
42	4	1	2	3	1	4	4	4	4	3	4	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4,7
43	2	2	2	2	1	5	5	5	4	4	4	4,5	4	3	3	5	3,8	3	3	3	5	5	3,8	4	5	5	4,7
44	2	1	1	2	1	3	4	5	4	5	5	4,3	4	5	3	3	3,8	5	4	4	3	5	4,2	4	5	4	4,3
45	5	1	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3,8	4	4	4	4	5	4,2	5	5	5	5
46	5	1	2	3	2	2	1	3	4	5	3	3	4	4	3	5	4	4	3	5	4	3	3,8	5	5	3	4,3
47	2	2	2	2	1	5	5	5	4	3	5	4,5	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
48	4	2	2	3	1	5	5	5	4	4	4	4,5	5	5	5	4	4,8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	2	1	2	2	1	3	3	3	4	3	3	3,2	4	3	4	3	3,5	3	3	3	4	5	3,6	4	4	4	4
50	5	1	2	2	1	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3,8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	5	1	2	3	1	4	4	5	4	3	3	3,8	4	4	3	3	3,5	5	5	5	4	4	4,6	4	4	5	4,3
52	2	1	2	3	3	3	4	5	5	5	5	4,5	5	4	5	5	4,8	4	4	4	3	4	3,8	4	5	5	4,7
53	2	1	2	3	2	4	4	4	4	3	3	3,7	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3,6	3	4	4	3,7
54	3	1	2	3	2	4	4	4	5	4	4	4,2	5	3	3	4	3,8	3	3	3	4	4	3,4	4	4	4	4
55	2	1	2	3	2	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	4	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	1	2	3	2	5	5	4	4	4	4	4,3	5	5	5	4	4,8	5	4	4	4	4	4,2	4	4	5	4,3
57	6	1	2	3	2	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	3	3,3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
58	4	1	2	2	1	3	4	2	4	2	4	3,2	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3,2	4	4	4	4
59	4	2	2	2	2	2	3	4	3	4	3	3,2	3	1	1	3	2	5	3	3	3	3	3,4	3	3	5	3,7
60	4	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3,8	5	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3,4	5	3	3	3,7

61	5	1	2	1	1	5	4	4	5	2	5	4,2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
62	3	1	2	3	2	4	3	4	3	4	3	3,5	3	4	4	4	3,8	4	4	4	3	3	3,6	4	3	4	3,7	
63	4	1	2	2	1	4	5	5	4	3	4	4,2	4	4	4	5	4,3	5	5	4	4	5	4,6	4	4	4	4	
64	3	1	2	1	1	4	5	4	4	2	4	3,8	4	5	4	4	4,3	5	5	5	4	4	4,6	5	4	4	4,3	
65	5	1	2	1	2	5	4	4	5	5	5	4,7	4	5	4	5	4,5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
66	5	1	2	1	3	4	4	5	3	3	4	3,8	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4,8	4	4	4	4	
67	3	1	2	1	2	3	4	3	4	4	4	3,7	4	3	3	4	3,5	4	3	3	3	3	3,2	4	4	4	4	
68	4	2	2	1	2	3	5	4	5	5	4	4,3	4	4	5	4	4,3	4	4	4	3	3	3,6	4	4	3	3,7	
69	4	1	2	1	2	4	4	3	4	2	4	3,5	4	4	3	3	3,5	4	4	4	4	3	3,8	3	4	4	3,7	
70	6	2	2	3	2	4	3	4	4	4	4	3,8	3	3	4	3	3,3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	
71	4	1	2	2	3	3	4	2	4	2	4	3,2	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3,2	4	4	4	4	
72	4	2	2	2	2	2	3	4	3	4	3	3,2	3	1	1	3	2	5	3	3	3	3	3,4	3	3	5	3,7	
73	4	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	3,8	5	4	4	3	4	5	3	3	3	3	3,4	5	3	3	3,7	
74	5	1	2	1	2	5	4	4	5	2	5	4,2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
75	3	2	2	3	2	4	3	4	3	4	3	3,5	3	4	4	4	3,8	4	4	4	3	3	3,6	4	3	4	3,7	
76	4	2	2	2	2	4	5	5	4	3	4	4,2	4	4	4	5	4,3	5	5	4	4	5	4,6	4	4	4	4	
77	3	1	2	1	2	4	5	4	4	2	4	3,8	4	5	4	4	4,3	5	5	5	4	4	4,6	5	4	4	4,3	
78	5	1	2	1	2	5	4	4	5	5	5	4,7	4	5	4	5	4,5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	
79	5	2	2	1	3	4	4	5	3	3	4	3,8	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	4,8	4	4	4	4	
80	3	2	2	1	2	3	4	3	4	4	4	3,7	4	3	3	4	3,5	4	3	3	3	3	3,2	4	4	4	4	
81	4	1	2	1	2	3	5	4	5	5	4	4,3	4	4	5	4	4,3	4	4	4	3	3	3,6	4	4	3	3,7	
82	5	2	2	1	2	4	3	3	3	4	4	3,5	4	5	4	2	3,8	4	4	3	3	3	3,4	4	4	4	4	
83	5	1	2	1	2	4	3	3	3	4	4	3,5	4	5	4	2	3,8	4	4	3	3	3	3,4	4	4	4	4	
84	5	1	2	1	2	4	3	3	3	4	4	3,5	4	5	4	2	3,8	4	4	3	3	3	3,4	4	4	4	4	

Lampiran 3 Identitas Responden

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25 tahun	1	1,2	1,2	1,2
	26-31 tahun	14	16,7	16,7	17,9
	32-37 tahun	14	16,7	16,7	34,5
	38-43 tahun	19	22,6	22,6	57,1
	44-49 tahun	25	29,8	29,8	86,9
	> 50 tahun	11	13,1	13,1	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	67	79,8	79,8	79,8
	Wanita	17	20,2	20,2	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Status Perkawinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum menikah	2	2,4	2,4	2,4
	Menikah	82	97,6	97,6	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	39	46,4	46,4	46,4
	Diploma	13	15,5	15,5	61,9
	Sarjana	32	38,1	38,1	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Penghasilan perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp 2.500.000	28	33,3	33,3	33,3
	Rp. 2.600.000 - Rp. 4.000.000	45	53,6	53,6	86,9
	4.100.000 - Rp. 5.500.000	11	13,1	13,1	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Lampiran 4 Persentase Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,2	1,2	1,2
	TS	8	9,5	9,5	10,7
	KS	25	29,8	29,8	40,5
	S	37	44,0	44,0	84,5
	SS	13	15,5	15,5	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

A2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,6	3,6	3,6
	TS	3	3,6	3,6	7,1
	KS	19	22,6	22,6	29,8
	S	36	42,9	42,9	72,6
	SS	23	27,4	27,4	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,8	4,8	4,8
	TS	7	8,3	8,3	13,1
	KS	13	15,5	15,5	28,6
	S	42	50,0	50,0	78,6
	SS	18	21,4	21,4	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,6	3,6	3,6
	TS	1	1,2	1,2	4,8
	KS	17	20,2	20,2	25,0
	S	46	54,8	54,8	79,8
	SS	17	20,2	20,2	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

A5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	6,0	6,0	6,0
	2	19	22,6	22,6	28,6
	3	15	17,9	17,9	46,4
	4	32	38,1	38,1	84,5
	5	13	15,5	15,5	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

A6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,2	1,2	1,2
	TS	8	9,5	9,5	10,7
	KS	25	29,8	29,8	40,5
	S	37	44,0	44,0	84,5
	SS	13	15,5	15,5	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Lampiran 5 Persentase Partisipasi Masyarakat (X_1)

B1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,6	3,6	3,6
	KS	18	21,4	21,4	25,0
	S	48	57,1	57,1	82,1
	SS	15	17,9	17,9	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

B2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	9,5	9,5	9,5
	TS	3	3,6	3,6	13,1
	KS	14	16,7	16,7	29,8
	S	40	47,6	47,6	77,4
	SS	19	22,6	22,6	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

B3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	6,0	6,0	6,0
	TS	5	6,0	6,0	11,9
	KS	14	16,7	16,7	28,6
	S	44	52,4	52,4	81,0
	SS	16	19,0	19,0	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

B4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,4	2,4	2,4
	TS	5	6,0	6,0	8,3
	KS	19	22,6	22,6	31,0
	S	38	45,2	45,2	76,2
	SS	20	23,8	23,8	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Lampiran 6 Persentase Kapasitas Aparatur Gampong (X₂)

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,8	4,8	4,8
	TS	1	1,2	1,2	6,0
	KS	9	10,7	10,7	16,7
	S	33	39,3	39,3	56,0
	SS	37	44,0	44,0	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,6	3,6	3,6
	TS	6	7,1	7,1	10,7
	KS	15	17,9	17,9	28,6
	S	38	45,2	45,2	73,8
	SS	22	26,2	26,2	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,4	2,4	2,4
	TS	5	6,0	6,0	8,3
	KS	23	27,4	27,4	35,7
	S	37	44,0	44,0	79,8
	SS	17	20,2	20,2	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

C4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,4	2,4	2,4
	TS	2	2,4	2,4	4,8
	KS	26	31,0	31,0	35,7
	S	42	50,0	50,0	85,7
	SS	12	14,3	14,3	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

C5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,8	4,8	4,8
	TS	1	1,2	1,2	6,0
	KS	10	11,9	11,9	17,9
	S	32	38,1	38,1	56,0
	SS	37	44,0	44,0	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Lampiran 7 Persentase Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X₃)

D1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,8	4,8	4,8
	TS	1	1,2	1,2	6,0
	KS	10	11,9	11,9	17,9
	S	49	58,3	58,3	76,2
	SS	20	23,8	23,8	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

D2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	6,0	6,0	6,0
	TS	4	4,8	4,8	10,7
	KS	12	14,3	14,3	25,0
	S	43	51,2	51,2	76,2
	SS	20	23,8	23,8	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

D3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,6	3,6	3,6
	TS	4	4,8	4,8	8,3
	KS	12	14,3	14,3	22,6
	S	42	50,0	50,0	72,6
	SS	23	27,4	27,4	100,0
	Total	84	100,0	100,0	

Lampiran 8 Reliability & Validitas Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	84	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	84	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,824	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
A1	3,63	,902	84
A2	3,87	,979	84
A3	3,75	1,040	84
A4	3,87	,875	84
A5	3,35	1,167	84
A6	3,63	,902	84

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
A1	18,46	13,095	,703	,775
A2	18,23	13,165	,616	,791
A3	18,35	12,132	,729	,764
A4	18,23	13,623	,636	,789
A5	18,75	14,672	,476	,872
A6	18,46	13,095	,703	,775

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
22,10	18,497	4,301	6

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		255,873	83	3,083	5,984	,000
Within People	Between Items	16,230	5	3,246		
	Residual	225,103	415	,542		
	Total	241,333	420	,575		
Total		497,206	503	,988		

Grand Mean = 3,68

Lampiran 9 Reliability & Validitas Partisipasi Masyarakat (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,804	4

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3,86	,838	84
B2	3,70	1,149	84
B3	3,73	1,034	84
B4	3,82	,946	84

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	11,25	6,720	,605	,767
B2	11,40	4,991	,728	,699
B3	11,38	5,468	,727	,700
B4	11,29	6,905	,452	,829

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15,11	10,049	3,170	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	208,509	83	2,512		
Within People					
Between Items	1,390	3	,463	,943	,421
Residual	122,360	249	,491		
Total	123,750	252	,491		
Total	332,259	335	,992		

Grand Mean = 3,78

Lampiran 10 Reliability & Validitas Kapasitas Aparatur Gampong (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,879	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	4,17	1,004	84
C2	3,83	1,016	84
C3	3,74	,933	84
C4	3,71	,830	84
C5	4,15	1,012	84

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	15,44	9,502	,817	,826
C2	15,77	9,912	,723	,850
C3	15,87	10,308	,733	,848
C4	15,89	12,145	,473	,901
C5	15,45	9,456	,817	,826

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
19,61	15,567	3,945	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	258,407	83	3,113	11,066	,000
Within People Between Items	16,705	4	4,176		
Residual	125,295	332	,377		
Total	142,000	336	,423		
Total	400,407	419	,956		

Grand Mean = 3,92

Lampiran 11 Reliability & Validitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Gampong (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,846	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3,95	,917	84
D2	3,82	1,043	84
D3	3,93	,967	84

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	7,75	3,539	,635	,857
D2	7,88	2,709	,809	,689
D3	7,77	3,189	,709	,790

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
11,70	6,573	2,564	3

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People	181,853	83	2,191	1,215	,299
Within People					
Between Items	,817	2	,409		
Residual	55,849	166	,336		
Total	56,667	168	,337		
Total	238,520	251	,950		

Grand Mean = 3,90

Lampiran 12 Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengawasan BPG (X3), Kapasitas Aparatur Desa (X2), Partisipasi Masyarakat (X1) ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,848 ^a	,719	,708	,38285

a. Predictors: (Constant), Pengawasan BPG (X3), Kapasitas Aparatur Desa (X2), Partisipasi Masyarakat (X1)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,950	3	9,983	68,109	,000 ^b
	Residual	11,726	80	,147		
	Total	41,676	83			

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

b. Predictors: (Constant), Pengawasan BPG (X3), Kapasitas Aparatur Desa (X2), Partisipasi Masyarakat (X1)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,509	,240		2,125	,037
	Partisipasi Masyarakat (X1)	,214	,091	,232	2,352	,013
	Kapasitas Aparatur Desa (X2)	,308	,084	,309	3,652	,000
	Pengawasan BPG (X3)	,407	,087	,491	4,705	,000

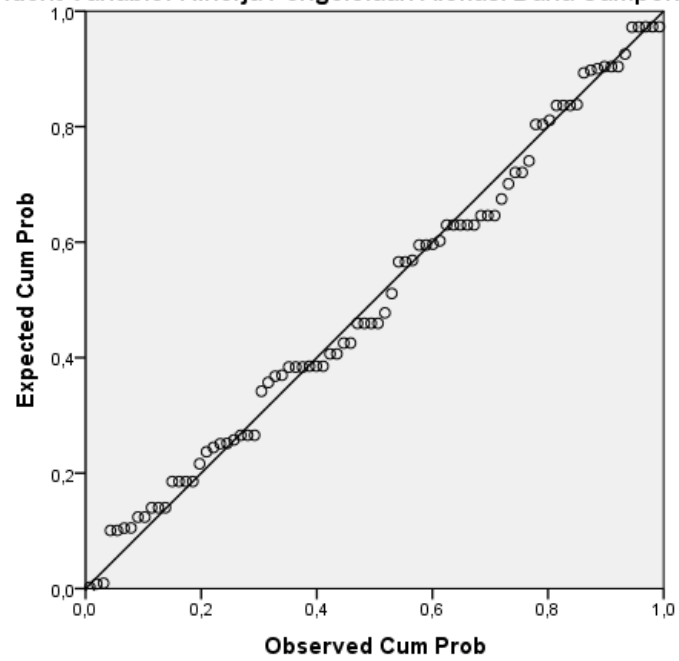
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Partisipasi Masyarakat (X1)	,318	3,145
	Kapasitas Aparatur Desa (X2)	,492	2,032
	Pengawasan BPG (X3)	,322	3,103

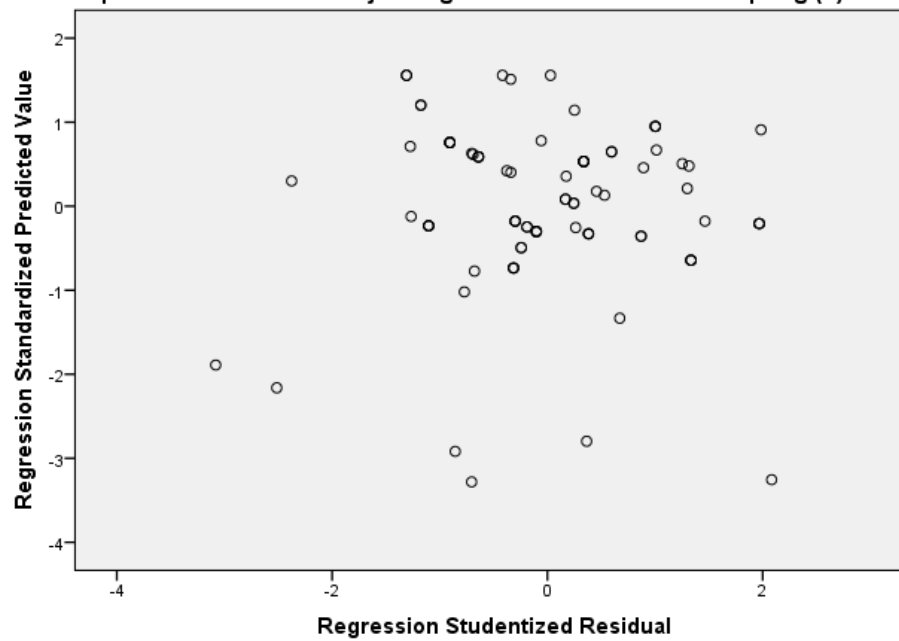
a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)



Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (Y)



Lampiran 13

Nilai-Nilai r Product Moment Pada Keyakinan 95%

n	Nilai r	n	Nilai r	n	Nilai r
3	0,997	27	0,381	55	0,266
4	0,950	28	0,374	60	0,254
5	0,878	29	0,367	65	0,244
6	0,811	30	0,361	70	0,235
7	0,754	31	0,355	75	0,227
8	0,707	32	0,349	80-84	0,220
9	0,666	33	0,344	85	0,213
10	0,632	34	0,339	90	0,207
11	0,602	35	0,334	95	0,202
12	0,576	36	0,329	100	0,194
13	0,553	37	0,325	125	0,176
14	0,532	38	0,320	150	0,159
15	0,514	39	0,316	175	0,148
16	0,497	40	0,312	200	0,138
17	0,482	41	0,308	300	0,113
18	0,468	42	0,304	400	0,098
19	0,456	43	0,301	500	0,088
20	0,444	44	0,297	600	0,080
21	0,433	45	0,294	700	0,074
22	0,423	46	0,291	800	0,070
23	0,413	47	0,288	900	0,065
24	0,404	48	0,284	1000	0,062
25	0,396	49	0,281		
26	0,388	50	0,279		

Note: n = Jumlah Sampel